

# LAPORAN

---

**AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
( LAKIP )  
TAHUN ANGGARAN 2021**

---



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon dapat diselesaikan.

Penyusunan LAKIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Inpres No 7 Tahun 1999 untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dipercayakan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa, Politik berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon Tahun 2019 - 2024.

Dengan tersusunnya LAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon Tahun 2021 ini, maka kami menyampaikan terimakasih kepada narasumber yang telah banyak membantu hingga selesainya penyusunan LAKIP ini, kami juga menyampaikan terimakasih kepada pelaksana kegiatan yang bekerja secara maksimal dalam melaksanakan kegiatan selama Tahun 2021.

Penyusunan LAKIP ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian LAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Namun demikian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon telah mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan. Semoga LAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon dapat mencerminkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon Tahun 2021.

Sumber, Februari 2022

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Cirebon,

**Dra.Hj. ITA ROHPITASARI, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19660810 198709 2 001

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja selama Tahun 2021. Capaian kinerja (performance results) Tahun 2021 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) Tahun 2021 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon Tahun 2021 dengan jumlah keseluruhan sasaran sebanyak 4 (Empat) sasaran dengan kegiatan sebanyak 11 (sebelas) kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan .

Kategori capaian sasaran yang berhasil sebanyak 4 (tiga) sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa capaian sebagian besar sasaran program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon Tahun 2021 sudah mencapai target yang telah ditetapkan dengan harapan semoga di tahun mendatang akan lebih ditingkatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang harus diupayakan semaksimal mungkin dalam pencapaiannya.

## DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUPOKSI SKPD	2
C. STUKTUR ORGANISASI	9
D. LANDASAN HUKUM	10
E. ISU STRATEGIS	11
F. SISTEMATIKA PENULISAN	12
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	14
A. RENCANA STRATEGIS	14
B. IKU SKPD	14
C. PENETAPAN KINERJA 2021	27
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	29
A. KERANGKA PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA	29
B. PENGUKURAN DAN ANALISIS KINERJA	34
1. Akuntabilitas Keuangan	35
2. Rincian Kinerja	35
C. INFORMASI KEUANGAN TERKAIT PENCAPAIAN SASARAN	43
BAB IV. PENUTUP	47
LAMPIRAN	
• PENETAPAN KINERJA	
• PENGUKURAN KINERJA	
• REALISASI ANGGARAN PER SASARAN	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dengan terbitnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Cirebon, dengan ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon tetap sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawah yang mempunyai tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sampai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum diundangkan.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon tetap memakai Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2018 tentang penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang kesatuan bangsa dan politik, dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, aman dan nyaman diperlukan stabilitas daerah yang kondusif, dari ancaman dan konflik

### **B. Tupoksi SKPD**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik, dan hubungan kelembagaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- a. Merencanakan, merumuskan kebijakan strategis, membina administrasi dan teknis, mengoordinasikan, mengendalikan serta mengevaluasi penyelenggaraan program dan kegiatan dibidang kesatuan bangsa dan politik;

- b. Merumuskan rencana strategis dan rencana kerja Badan berdasarkan visi dan misi daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Merumuskan program kerja di lingkungan badan berdasarkan rencana strategis badan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- e. Membina bawahan di lingkungan badan dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- f. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Badan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Merumuskan perencanaan dan pengendalian anggaran serta pengendalian administrasi Badan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi;
- h. Menetapkan pedoman teknis pengaturan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NPSK) bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. Merumuskan dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. Mengendalikan dan membina pelaksanaan bina ideologi, wawasan kebangsaan dan politik dalam negeri sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- k. Mengendalikan dan membina pelaksanaan ketahanan bangsa dan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- l. Mengendalikan dan membina pelaksanaan ketahanan bangsa dan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- m. Mengendalikan dan membina pelaksanaan kewaspadaan nasional sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;

- n. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- o. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Badan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja; dan
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana urusan wajib bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri serta sub bidang Pemerintahan Umum, maka dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 50 tahun 2021 Tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat disimpulkan menjadi kewenangan yang mencakup :

- a. Mengkaji dan merumuskan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Merumuskan, menyusun dan menetapkan rencana dan program kerja Kantor sebagai pedoman kerja sesuai kebijakan Pemerintah Daerah;
- c. Memberikan pelayanan fasilitas, mediasi, konsultasi, koordinasi, dan motivasi secara teknis administrasi dan operasional di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. Memberikan ijin/rekomendasi di bidang hubungan lembaga dan politik;
- e. Memberikan informasi dan saran pertimbangan kepada Bupati dalam hal urusan kesatuan bangsa dan politik sebagai bahan penetapan kebijakan Bupati;
- f. Menyusun, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan tugas Kantor sesuai dengan bidang tugas baik secara operasional maupun administrasi kepada bupati melalui Sekretaris Daerah;
- g. Menetapkan kebijakan operasional di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama dan masyarakat, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, ketentraman,
- h. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama dan masyarakat, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, ketentraman, ketertiban umum;
- i. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama dan masyarakat, politik dalam

- negeri, ketahanan ekonomi, ketentraman, ketertiban umum;
- j. Meningkatkan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, ketentraman, ketertiban umum;
  - k. Menyelenggarakan pengembangan budaya kerja aparatur daerah di lingkup kantor;
  - l. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/ kegiatan Kantor, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
  - m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja, bahwa Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris, membawahi :
  - a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub. Bagian Keuangan dan Aset;
  - c. Sub. Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama membawahi:
  - a. Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
  - b. Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama.
4. Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan:
  - a. Subbidang Politik Dalam Negeri;
  - b. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan.
5. Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik membawahi :
  - a. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen
  - b. Subbidang Penanganan Konflik.



**Tabel  
Komposisi Pegawai  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon  
Tahun 2021**

<b>No</b>	<b>Unit kerja</b>	<b>PNS</b>	<b>Honorer</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Kepala Badan	1	-	1
2.	Sekretaris Badan	1	-	1
3.	Kepala Bidang	3	-	3
4.	Kepala Sub Bag (Sekretariat)	3	-	3
5.	Kepala Sub Bidang	5	-	5
6.	Staf	11	11	22
7.	Fungsional	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		24	11	35

Komposisi pegawai selain yang tersebut di atas dapat dilihat dari :

**a. Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan**

Secara lengkap gambaran tentang kepegawaian di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menurut status, pangkat dan golongan adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel**  
**Jumlah Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan**  
**Tahun 2021**

No	Status Kepegawaian	Gol / Ruang	Kepala Badan	Sekretaris	Kepala Bidang	Kasubag/Ka subid	Staf	Fungsional	Total
<b>1.</b>	<b>PNS</b>								
	Pembina Utama Muda	IV/c	1						1
	Pembina Tingkat I	IV/b		1					1
	Pembina	IV/a			3				3
	Penata Tingkat I	III/d				4			4
	Penata	III/c				1	2		3
	Penata Muda Tingkat I	III/b					2		2
	Penata Muda	III/a					3		3
	Pengatur Tingkat I	II/d					2	-	2
	Pengatur	II/c					1		1
	Pengatur Muda Tingkat I	II/b					1		1
	Pengatur Muda	II/a					-		-
	Juru Tingkat I	I/d							
	Juru	I/c							
	Juru Muda Tingkat I	I/b							
Juru Muda	I/a								
<b>2.</b>	<b>Honorar</b>						8		8

**b. Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan**

Berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi pegawai di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dapat disebutkan sebagai berikut :

**Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan**

<b>No</b>	<b>Status Kepegawaian</b>
1.	<b>PNS</b>
	Strata 3 (S-3) berjumlah : -
	Strata 2 (S-2) berjumlah : 4
	Strata 1 (S-1) berjumlah : 14
	Diploma IV berjumlah : -
	Diploma III berjumlah : -
	Diploma II berjumlah : -
	Diploma I berjumlah : -
	SMA/Sederajat berjumlah : 4
	SMP/Sederajat berjumlah : -
	SD/Sederajat berjumlah : -
2.	<b>Honorar</b>
	Strata 2 (S-2) berjumlah : -
	Strata 1 (S-1) berjumlah : 4
	Diploma IV berjumlah : -
	Diploma III berjumlah : -
	Diploma II berjumlah : -
	Diploma I berjumlah : 1
	SMA/Sederajat berjumlah : 2
	SMP/Sederajat berjumlah : -
	SD/Sederajat berjumlah : 1

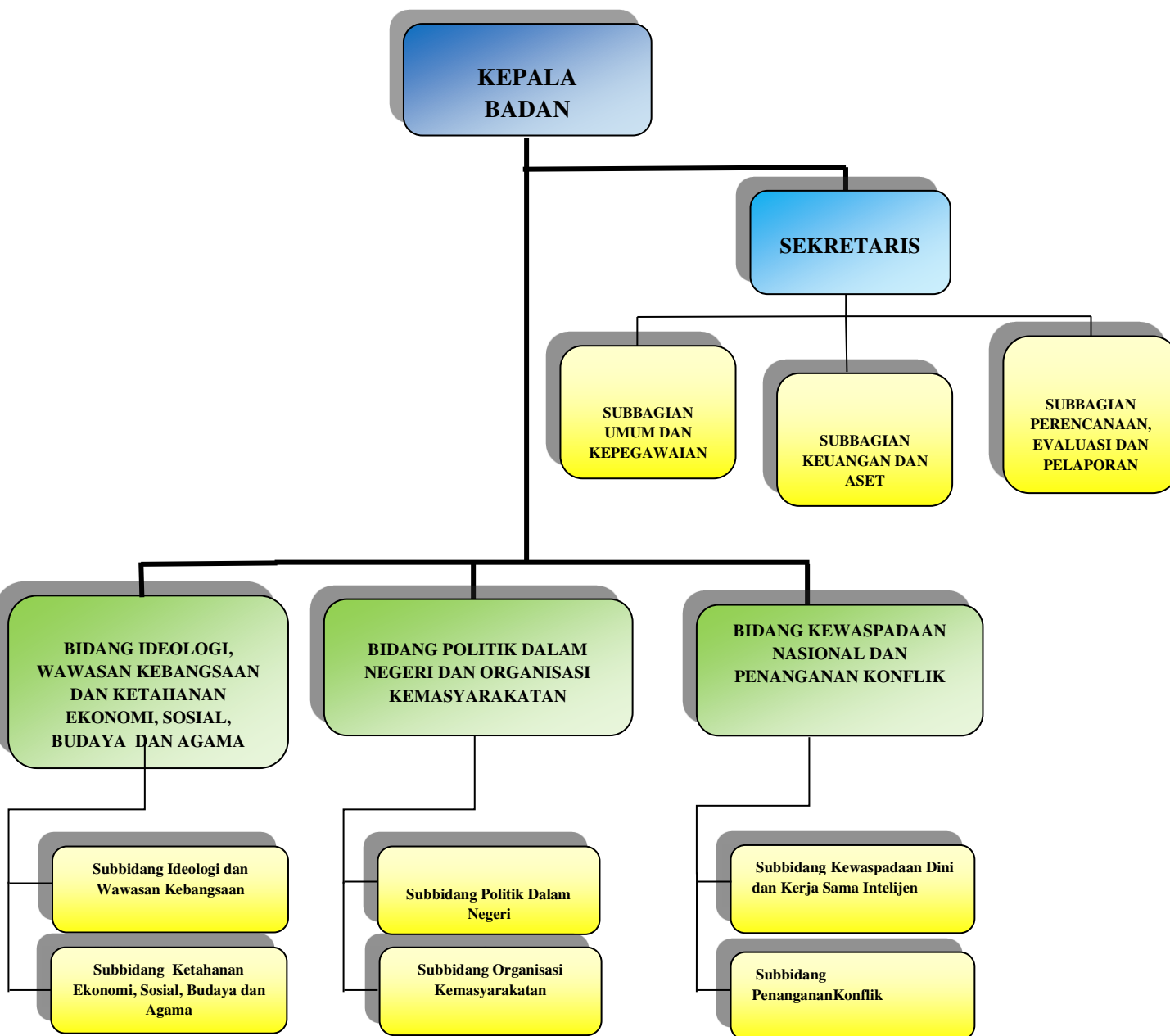
Gambaran secara lengkap tentang pegawai di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menurut latar belakang pendidikan yang ditamatkan adalah sebagaimana ditunjukkan Tabel pada halaman berikut :

**Tabel**  
**Jumlah Pegawai Menurut Status, dan Tingkat Pendidikan**  
**Tahun 2021**

No	Status Kepegawaian	Kepala Badan	Sekretaris	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kasubbag Program dan Keuangan	Kepala Bidang	Kasubbid	Staf	Fungsional	Total
1.	<b>PNS</b>									
	Strata 3 (S-3)									
	Strata 2 (S-2)	1	1	-	-	1	3	-		6
	Strata 1 (S-1)	-	-	1	2	2	2	7		14
	Diploma IV									
	Diploma III									
	Diploma II									
	Diploma I									
	SMA / Sederajat					-		4		4
	SMP / Sederajat									
	SD / Sederajat									
2.	<b>Honorer</b>									
	Strata 3 (S-3)									
	Strata 2 (S-2)									
	Strata 1 (S-1)					-		4		4
	Diploma IV									
	Diploma III									
	Diploma II									
	Diploma I							1		1
	SMA / Sederajat					-		2		2
	SMP / Sederajat									
	SD / Sederajat					-		1		1
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>32</b>

### C. STRUKTUR ORGANISASI

Gambar  
Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Cirebon



#### **D. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan LKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021, antara lain :

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
12. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
13. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan/Kantor Daerah Kabupaten Cirebon;
14. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2021 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon

## **E. Isu Strategis**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Adapun isu strategis tersebut adalah :

- 1) Kesenjangan sosial Politik, Sosial Ekonomi dan Budaya
- 2) Kemajemukan masyarakat dengan latar belakang SARA, etnis, dan kesukuan yang cukup kental sehingga rentan terhadap isu-isu Primordialisme.
- 3) Belum maksimalnya pendidikan politik di masyarakat
- 4) Hasil proses politik (Pemilihan Kepala daerah) masih sering dikomplain oleh kandidat lain.
- 5) Masih sering terjadi perselisihan antar warga terkait pendirian Rumah Ibadah .
- 6) Masih banyaknya aliran kepercayaan yang menimbulkan keresahan di masyarakat.
- 7) Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat belum berperan secara maksimal.
- 8) Peran Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Pemuda dan Tokoh Perempuan belum berperan secara maksimal dalam mencegah dan menyelesaikan konflik.
- 9) Kurangnya pemahaman tentang wawasan Kebangsaan sehingga mengakibatkan lemahnya semangat persatuan dan kesatuan.
- 10) Masyarakat masih rentan terhadap isu-isu yang berpotensi konflik.
- 11) Penyelesaian masalah masih sering diselesaikan dengan jalan unjuk rasa atau demonstrasi yang anarkis.
- 12) Masih maraknya aksi terorisme dan penyebaran paham radikalisme.
- 13) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) asing sering memanfaatkan LSM lokal dalam pencapaian misinya.
- 14) Konflik wilayah perbatasan dan pertikaian antar warga, antar pemuda dan antar desa.
- 15) Penyalahgunaan narkoba yang semakin banyak.
- 16) Timbul kembali paham aliran komunisme, separatisme, radikalisme, dan terorisisme.

Dari beberapa permasalahan yang telah di kemukakan di atas maka dapat di ketahui faktor-faktor yang mendorong munculnya permasalahan tersebut, baik faktor internal maupun eksternal. Secara umum, permasalahan tersebut dapat dirangkum menjadi lima permasalahan utama untuk urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri sebagai berikut :

1. Pada umumnya kemampuan kelembagaan masyarakat termasuk partai politik masih terbatas baik dari segi manajemen maupun kemampuan finansial membiayai aktivitasnya.
2. Jumlah kelembagaan masyarakat termasuk partai politik cukup besar dibanding dengan kemampuan fiskal pemerintah untuk mendukung pembinaannya.
3. Sering terjadi konflik internal yang berimbas pada fasilitasi pemerintah daerah dan dukungan pemikiran lainnya yang seharusnya tidak relevan lagi di era demokrasi.
4. Masih ditemuinya konflik dan kasus kekerasan antar kelompok masyarakat serta perlakuan diskriminatif terhadap kelompok minoritas etnis dan agama tertentu
5. Belum optimalnya pengintegrasian nilai-nilai kebangsaan dan Bhineka Tunggal Ika (prinsip keberagaman) dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara.

## **F. Sistematika Penyajian**

Laporan Akuntabilitas Kinerja disusun berdasarkan deskripsi mengenai pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon selama tahun 2021. Capaian kinerja (*performance result*) 2021 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi, analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah kesenjangan kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang dengan pola pikir seperti itu.

Adapun Sistematika Penyajian adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif

Daftar Isi

Bab I    Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan struktur organisasi

Bab II   Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan muatan Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa Politik untuk periode 2014 - 2019 dan Penetapan Kinerja untuk tahun 2021



Bab III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian indikator kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta analisis pencapaian kinerja dikaitkan dengan pertanggung jawaban manajerial terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2021

Bab IV Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2021 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Lampiran-lampiran

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem dan kebijakan bidang aparatur negara termasuk pembinaan terhadap akhlak dan perilaku aparatur serta pengawasan dan pengendalian manajemen, agar tercapai efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri serta Perlindungan Masyarakat yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005 - 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019 - 2024, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan rencana strategis Tahun 2019 - 2024 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2019 - 2024.

##### 2.1.1. Visi

Mengacu kepada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Cirebon yaitu : ***“Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman “***, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik membangun kelanjutan dan kesinambungan Visinya yaitu :

“Meningkatnya masyarakat Kabupaten Cirebon yang agamis, demokratis, partisipatif, harmonis, tertib, aman, tenteram, berkeadilan dan beradab dalam kerangka persatuan dan kesatuan yang berlandaskan Pancasila”.

### 2.1.2. Misi

Misi adalah upaya-upaya yang didasari kemauan kuat dari suatu lembaga/organisasi dengan memperlihatkan kewenangan dan tanggung jawabnya atas kepentingan umum (Publik) guna mewujudkan kondisi dan situasi yang diinginkan pada akhir kurun waktu tertentu yang menyiratkan tujuan-tujuan yang harus dicapai sebagai persyaratan terwujudnya Visi.

#### Misi

1. Kabupaten Cirebon BERBUDAYA :

Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat.

2. Kabupaten Cirebon SEJAHTERA :

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi.

3. Kabupaten Cirebon AGAMIS :

Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika.

4. Kabupaten Cirebon MAJU

Meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.

5. Kabupaten Cirebon AMAN :

Memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional.

Adapun Misi yang menjadi langkah kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dalam mendukung Visi Misi Kabupaten Cirebon adalah masuk pada Misi *kelima* yaitu sebagai berikut :

***"Memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas"***

### **2.1.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

#### **a. Tujuan**

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya dengan formula yang disesuaikan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **1) Meningkatkan kondusifitas masyarakat yang berwawasan kebangsaan Politik;**

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya dengan formula yang disesuaikan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Terwujudnya pelayanan prima Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Terciptanya manusia Kabupaten Cirebon yang sehat, mandiri, beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air/berwawasan kebangsaan, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki etos kerja yang tinggi dan berdisiplin;
- c. Terwujudnya pelaksanaan pengembangan demokratisasi sesuai norma, etika dan budaya yang berpancasila.

#### **d. Sasaran**

1. Menurunnya pergesekan ( fiksi ) antar dan internal umat beragama;
2. Menurunnya konflik sosial;
3. Menurunnya kegiatan yang bertentangan dengan norma agama, sosial dan adat;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

#### **e. Kebijakan**

- 1) Fasilitasi komunikasi forum forum antar umat beragama;
- 2) Peningkatan pembinaan terhadap kelompok sosial kemasyarakatan.
- 3) Penguatan lembaga sosial, agama dan adat;
- 4) Peningkatan Pengetahuan dan pemahaman wawasan kebangsaan dan cinta tanah air yang beretika dan bermoral Pancasila;
- 5) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran etika dan budaya demokratisasi masyarakat yang Pancasilais dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui pemberdayaan lembaga pemerintahan, partai politik, organisasi kemasyarakatan dan LSM.

### **B. Indikator Kinerja Utama ((IKU)SKPD**

#### **a. Pengertian Indikator Kinerja**

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih menekankan akuntabilitas kinerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi masing-masing. Indikator Kerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Setiap program dan kegiatan dalam Renstra kemudian dinyatakan dalam suatu indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu. hanya dengan indikator kinerja yang memenuhi kelima karakteristik kualitatif inilah keberhasilan pencapaian program dan kegiatan nantinya dapat dilakukan. Keberhasilan program diukur dengan indikator hasil (outcome), sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (output). penetapan indikator program dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan program dan kegiatan-kegiatan yang mendukung program tersebut. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) kebijaksanaan/program/kegiatan dan pada akhirnya kinerja instansi/unit kerja yang melaksanakan.

#### **b. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja**

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja instansi yang bersangkutan yaitu :

1. Spesifik;
2. Dapat dicapai;
3. Relevan;
4. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur;
5. Dapat dikuantifikasi dan diukur.

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama harus mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah, Rencana Strategis, kebijakan umum dan atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta peran lainnya;
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
4. Kebutuhan data statistik pemerintah;
5. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, dan sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama dalam pencapaian target.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon pada Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN CIREBON**

1. Unit : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik  
Organisasi
2. Tugas : Penyusunan dan Penyelenggaraan Kebijakan  
Pokok Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan  
Politik
3. Fungsi : a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang  
Kesatuan Bangsa dan Politik Masyarakat;  
b.

- Pemberian dukungan atas
- c. penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - Pembinaan dan pelaksanaan tugas
  - d. bidang ketahanan bangsa,
  - e. Pengembangan demokrasi, dan Hubungan Lembaga;
  - f. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan kantor;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Sasaran Strategis Renstra :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Indikator Kinerja Utama	Sumber Data (Internal & Eksternal)
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran, sarana prasarana dan kapasitas sumber daya aparatur dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah kebutuhan administrasi perkantoran yang telah direalisasikan dibagi jumlah administrasi perkantoran yang menjadi target dikali 100%	Kesbangpol
		Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana yang telah direalisasikan dibagi Jumlah sarana dan prasarana yang menjadi target dikali 100%	Kesbangpol

		Terwujudnya peningkatan disiplin pakaian aparaturnya	Jumlah pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya yang terealisasi dibagi Jumlah target pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya dikali 100%	Kesbangpol
		Terwujudnya Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tepat waktu dalam penyampaian laporan kinerja, semesteran dan tahunan SKPD	Kesbangpol
		Terlaksananya pengembangan sistem perencanaan sectoral	Tepat waktu dalam penyampaian dokumen perencanaan SKPD	Kesbangpol
2.	Meningkatnya penyelesaian pergesekan ( friksi ) antar dan internal umat beragama	Prosentase Penyelesaian Friksi/Gesekan antar Umat Beragama	Jumlah konflik SARA yang terjadi di wilayah Kabupaten Cirebon	Kesbangpol
3.	Meningkatnya penyelesaian konflik sosial	Prosentase Penyelesaian Konflik sosial	Perbandingan jumlah konflik sosial, demo dan kerusuhan pada kondisi awal dengan jumlah konflik sosial, demo dan kerusuhan pada tahun berikutnya  Perbandingan organisasi politik dan masyarakat yang aktif dengan total organisasi politik dan masyarakat yang ada di kabupaten Cirebon	Kesbangpol
4.	Meningkatnya penyelesaian pelanggaran norma agama, sosial dan adat	Penyelesaian pelanggaran norma agama, sosial dan adat	Tingkat partisipasi : perbandingan jumlah pemilih dengan jumlah hak pilih	Kesbangpol

Mengacu pada Indikator diatas maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021 adalah :



## 1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

Di zaman yang penuh dengan persaingan ini, makna dan nilai-nilai Pancasila harus tetap diamalkan dalam kehidupan kita, agar keberadaannya tidak hanya dijadikan sebagai simbol semata. Pancasila dalam sejarah perumusannya melalui proses yang sangat panjang oleh para pendiri negara ini. Pengorbanan tersebut akan sia-sia apabila kita tidak menjalankan amanat para pendiri negara yaitu Pancasila yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke-4. Pancasila diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman hidup bagi kehidupan manusia, baik itu dalam lingkungan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga dalam berperilaku dan bersosialisasi antar sesama manusia, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus dilandasi oleh Pancasila yang dijadikan landasan dalam berperilaku. Wawasan Kebangsaan harus menjadi bagian yang terintegrasi bukan hanya sepihak pemerintah daerah tetapi sebuah tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Demi mewujudkan hal tersebut maka di Tahun 2021 beberapa kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah:

- Kegiatan Pembinaan Ideologi, dan Wawasan Kebangsaan di kalangan masyarakat dan mahasiswa di Kabupaten Cirebon
- Sosialisasi Perundang-Undangan Bagi Pemilih Pemula
- Sosialisasi Wawasan Kebangsaan melalui kegiatan Sarasehan Seni dan Budaya di Kabupaten Cirebon, dapat di lihat pada tabel berikut ini

:

Tabel 1.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya penyelesaian pelanggaran norma agama, sosial dan adat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya kualitas jiwa dan sikap wawasan kebangsaan bagi masyarakat untuk mencapai tujuan NKRI</li> <li>- Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan Bdadng Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela</li> </ul>	82 % (3 Kegiatan)

		Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan - Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan Peningkatan Wawasan Kebangsaan	
--	--	--	--

## 2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Pada Tahun 2021 Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik di selenggarakan direncanakan dua kegiatan dalam rangka meningkatkan pendidikan politik masyarakat.

Hasil yang diharapkan adalah meningkatnya partisipasi partai politik dan meningkatnya Pendidikan Politik Masyarakat. Dengan kegiatan yaitu sebagai berikut :

- Sosialisasi Penyelesaian Perselisihan Partai Politik melalui kegiatan Talkshow Perundang-undangan di Bidang Politik
- Bimtek Bendahara Keuangan Parpol di kalangan Pengurus Partai Politik, dan tersedianya Bantuan Keuangan Partai Politik, Terselenggaranya Persiapan Pelaksanaan dan Pengawasan Kegiatan Pilwu Serentak di Kabupaten Cirebon Dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya penyelesaian pelanggaran norma agama, sosial dan adat	- Jumlah peserta yang diberikan sosialisasi pendidikan politik, etika budaya politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	82 % (2Kegiatan)

		Pemantauan Situasi Politik di Daerah - Jumlah peserta bimtek bendahara keuangan parpol, Jumlah kegiatan sosialisasi pencegahan friksi di masyarakat, Jumlah kegiatan pemantauan perkembangan politik, Jumlah hibah bantuan keuangan parpol, Jumlah hibah bantuan KPU/Bawaslu	
--	--	---	--

### 3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Pada Tahun 2021 Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di selenggarakan melalui satu kegiatan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Cirebon. Hasil yang diharapkan adalah meningkatnya pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Cirebon. Dengan kegiatan yaitu sebagai berikut :

- Kegiatan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Cirebon

Dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya penyelesaian konflik sosial	- Jumlah Orang yang Diberi Pembinaan/ Sosialisasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan	83 % (1 Kegiatan)

		Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Kabupaten Cirebon	
--	--	--	--

#### 4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

Pada Tahun 2021 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya di selenggarakan melalui tiga kegiatan dalam rangka meningkatkan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Kabupaten Cirebon

Hasil yang diharapkan adalah meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Kabupaten Cirebon Dengan kegiatan yaitu sebagai berikut :

- Kegiatan fasilitasi dan koordinasi pembinaan Pencegahan Narkotika, dan terlaksananya Koordinasi FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Kabupaten Cirebon, serta sosialisasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)
- Koordinasi dan Laporan Terkait Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- Monitoring Terkait Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, dan Monitoring Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya penyelesaian konflik sosial	- Jumlah Orang yang Diberi Pembinaan/Sosialisasi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Kabupaten Cirebon.	83 % (3 Kegiatan)

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Koordinasi yang Dilakukan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Kabupaten Cirebon.</li> <li>- Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Kabupaten Cirebon</li> </ul>	
--	--	---	--

**5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**

Pada Tahun 2021 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial di selenggarakan melalui lima kegiatan dalam rangka meningkatkan Ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Cirebon.

Hasil yang diharapkan adalah meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Cirebon Dengan kegiatan yaitu sebagai berikut :

- Pembinaan pelatihan intelijen, Terbinanya eksnapiter dan keluarganya yang mendapatkan program deradikalisasi
  - Pembentukan Tim FKDM Kabupaten Cirebon
  - Koordinasi dan pembahasan bidang Ipoleksosbudhankam oleh Forkopimda
- Dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya penyelesaian pergesekan ( friksi ) antar dan internal umat beragama	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah konflik yang ditangani, jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan Intelijen, jumlah Peserta Kewaspadaan Dini yang difasilitasi tingkat Kabupaten dan jumlah Keluarga Napiter, Eks Napiter dan Keluarganya yang mendapatkan program Deradikalisasi</li> <li>- Jumlah Peserta Kewaspadaan Dini yang difasilitasi tingkat Masyarakat dan jumlah permasalahan yang ditangani Tim Wasdin Pemda</li> <li>- jumlah fasilitasi pembahasan dan koordinasi bidang Ipoleksosbudkam oleh Forkopimda</li> <li>- Jumlah Kejasama dan Pencegahan Kriminal yang dilakukan dan pengawasan keberadaan orang</li> </ul>	80 % (5 Kegiatan)

		asing/lembaga asing/tenaga kerja asing dan Jumlah Dokumen Pelaporan Pengawasan orang asing - Jumlah orang yang mendapatkan pengetahuan deteksi dan cegah dini keberadaan Pengawasan orang asing dan pencegahan tindak kejahatan	
--	--	--	--

### C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon. Perjanjian Kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Perjanjian Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta rencana capaiannya.

Perjanjian Kinerja sendiri pada dasarnya adalah komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur

dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Perjanjian Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang dijanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah antara lain :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan/sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Perjanjian Kinerja disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun berkenaan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2021 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang ada, eselon II, III, sampai dengan eselon IV.

Selanjutnya tabel Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 dan perubahannya disajikan sebagaimana pada lampiran Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2021 ini (Perjanjian Kinerja Terlampir).



## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada tahun 2021 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik telah melakukan beberapa Program/Kegiatan yang secara keseluruhan dapat terlaksana dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Lebih kepada pelaksanaan kegiatan Sosialisasi, Pembinaan, Koordinasi serta Monitoring. Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif untuk menjawab secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon selaku pengemban sebagian tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Cirebon melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Cirebon yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan dimaksud memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/kegiatan serta indikator makro baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2021.

#### **A. Kerangka Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja**

Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon diukur berdasarkan tingkat pencapaian kinerja sasaran dan program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran dilakukan melalui media rencana kinerja yang kemudian dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian kinerja sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Indikator sasaran adalah suatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan tersebut.

Media pengukuran kinerja terdiri dari :

- Formulir PK (Pengukuran Kinerja)

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan diberlakukan penggunaan nilai disertai makna dari nilai-nilai tersebut, yaitu :

- 100 = target tercapai
- < 100 = target tidak tercapai

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapainya kinerja yang diharapkan.

Penjabaran evaluasi kinerja dari setiap sasaran kinerja di tahun 2021 serta perbandingan dari kinerja tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

**1. Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran, sarana prasarana dan kapasitas sumber daya aparatur dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2020			2021		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran, sarana prasarana dan kapasitas sumber daya aparatur dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah	- Indeks kepuasan masyarakat	70% (1 SKPD)	100% (1 SKPD)	100% (1SKPD)	75% (1 SKPD)	100% (1 SKPD)	133% (1 SKPD)

## 2. Meningkatnya penyelesaian pelanggaran norma agama, sosial dan adat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2020			2021		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya penyelesaian pelanggaran norma agama, sosial dan adat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya kualitas jiwa dan sikap wawasan kebangsaan bagi masyarakat untuk mencapai tujuan NKRI</li> <li>- Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</li> <li>- Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan Peningkatan Wawasan Kebangsaan</li> </ul>	80% (3 Kegiatan)	92,27% (3 Kegiatan)	115,33% (3 Kegiatan)	82% (3 Kegiatan)	99,93% (3 Kegiatan)	121,86% (3 Kegiatan)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2020			2021		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya penyelesaian pelanggaran norma agama, sosial dan adat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah peserta yang diberikan sosialisasi pendidikan politik, etika budaya politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</li> <li>- Jumlah peserta bimtek bendahara keuangan parpol, Jumlah kegiatan sosialisasi pencegahan friksi di masyarakat, Jumlah kegiatan pemantauan perkembangan politik, Jumlah hibah bantuan keuangan parpol, Jumlah hibah bantuan KPU/Bawaslu</li> </ul>	80% (3 Kegiatan)	99,93 % (3 Kegiatan)	124,9 % (3 Kegiatan)	82% (2 Kegiatan)	97,74% (2 Kegiatan)	119,19% (2 Kegiatan)

--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 3. Meningkatnya penyelesaian konflik sosial

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2020			2021		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya penyelesaian konflik sosial	- Jumlah Orang yang Diberi Pembinaan/ Sosialisasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Kabupaten Cirebon	80% (4 Kegiatan)	63,48% (4 Kegiatan)	79,35% (4Kegiatan)	83% (1 Kegiatan)	94,55% (1 Kegiatan)	113,9% (1 Kegiatan)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2020			2021		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya penyelesaian konflik sosial	- Jumlah Orang yang Diberi Pembinaan/Sosialisasi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Kabupaten Cirebon. - Jumlah Koordinasi yang Dilakukan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Kabupaten Cirebon.	80% (4 Kegiatan)	93,09% (4 Kegiatan)	116,36% (4 Kegiatan)	83 % (3 Kegiatan)	99,72% (3 Kegiatan)	120,14% (3 Kegiatan)

		- Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Kabupaten Cirebon						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

#### 4. Meningkatnya penyelesaian pergesekan ( friksi ) antar dan internal umat beragama

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2020			2021		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya penyelesaian pergesekan ( friksi ) antar dan internal umat beragama	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah konflik yang ditangani, jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan Intelijen, jumlah Peserta Kewaspadaan Dini yang difasilitasi tingkat Kabupaten dan jumlah Keluarga Napiter, Eks Napiter dan Keluarganya yang mendapatkan program Deradikalisasi</li> <li>- Jumlah Peserta Kewaspadaan Dini yang difasilitasi tingkat Masyarakat dan jumlah permasalahan yang ditangani Tim Wasdin Pemda</li> <li>- jumlah fasilitasi pembahasan dan koordinasi bidang Ipoleksosbudkam oleh Forkopimda</li> <li>- Jumlah Kejasama dan Pencegahan Kriminal yang dilakukan dan pengawasan keberadaan orang asing/lembaga asing/tenaga kerja asing dan Jumlah Dokumen Pelaporan Pengawasan orang asing</li> </ul>	78 % (5 Kegiatan)	97,21% (5 Kegiatan)	124,62% (5 Kegiatan)	80% (5 Kegiatan)	89,57% (5 Kegiatan)	111,96% (5 Kegiatan)

		- Jumlah orang yang mendapatkan pengetahuan deteksi dan cegah dini keberadaan Pengawasan orang asing dan pencegahan tindak kejahatan						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

## B. Analisis Atas Pencapaian Sasaran

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah adalah dengan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan tahun anggaran 2021 sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003.

KODE REK.	URAIAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	PERSEN (%)
4.	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-	-	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>					
5.	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>14.011.077.407,48</b>	<b>13.136.056.119,00</b>	<b>875.021.288,48</b>	<b>93,75%</b>
5.1.	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>13.724.423.041,00</b>	<b>12.852.561.519,00</b>	<b>871.861.522,00</b>	<b>93,65%</b>
5.1.1.	BELANJA PEGAWAI	3.912.380.000,00	3.588.748.683,00	323.631.317,00	91,73%
	BELANJA BARANG DAN JASA	3.707.583.041,00	3.538.752.836,00	168.830.205,00	95,45%
	BELANJA HIBAH	6.104.460.000,00	5.725.060.000,00	379.400.000,00	93,78%
5.2.	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>286.654.366,48</b>	<b>283.494.600,00</b>	<b>3.159.766,48</b>	<b>98,90 %</b>
5.2.1.	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	86.594.000,00	84.582.600,00	2.012.000,00	97,68%
5.2.2.	BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	199.448.366,48	198.300.000,00	1.148.366,48	99,42%
5.2.3.	BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	612.000,00	612.000,00	0	100%
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>14.011.077.407,48</b>	<b>13.136.056.119,00</b>	<b>875.021.288,48</b>	<b>93,75%</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		<b>(14.011.077.407,48)</b>	<b>(13.136.056.119,00)</b>	<b>(875.021.288,48)</b>	<b>93,75%</b>

Dana yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran tersebut, berasal dari APBD Kabupaten Cirebon Tahun 2021. Realisasi dana pada anggaran tersebut tercapai 93,75%.

## 1. Akuntabilitas Keuangan

Tahun 2021 secara keseluruhan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan Anggaran sebesar Rp14.011.077.407,48,- dan terealisasi sebesar Rp.13.136.056.119,- sisa sebesar Rp875.021.288,48,- atau tercapai sebesar 93,75%. Dengan pelaksanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan 2 (dua) urusan pemerintahan, yaitu urusan yang melekat pada SKPD (non urusan) dan Urusan Pemerintahan Umum). Pelaksanaan urusan yang melekat pada SKPD (non urusan) pada Tahun 2021 dilaksanakan melalui 1 (satu) Program, 6 (enam) kegiatan, 22 (dua puluh dua) sub kegiatan , dengan anggaran sebesar Rp. 4.668.608.607,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.290.772.462,- sisa sebesar Rp. 377.836.145 ,- atau tercapai sebesar 91,90 %.

Sementara Urusan Pemerintahan Umum pada Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan melalui 5 (lima) Program, 5 (Lima) Kegiatan dan 14 (Empat Belas) Sub Kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp.9.342.468.800- dan terealisasi sebesar Rp. 8.845.283.657,- sisa pagu Rp. 497.185.143- atau tercapai sebesar 94,67%.

## 2. Rincian Kinerja

Berdasarkan kinerja yang telah dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon Pada Tahun 2021 telah melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab sebanyak 4 (empat) sasaran yang ditetapkan, dan berhasil dicapai :

No.	Sasaran Strategis	Pencapaian		
		Tercapai	Belum Tercapai	Tidak Tercapai
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	√		
2.	Meningkatnya penyelesaian pergesekan ( friksi ) antar dan internal umat beragama	√		
3.	Meningkatnya penyelesaian konflik sosial	√		
4.	Meningkatnya penyelesaian pelanggaran norma agama, sosial dan adat	√		

## ANALISIS CAPAIAN KINERJA 2021

### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pada tahun 2021 Program kegiatan yang berjalan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan :

- Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

A. Maksud dan tujuan :

Pelayanan administrasi perkantoran bertujuan untuk mewujudkan pelayanan administrasi perkantoran yang baik

B. Sasaran :

Sasaran program pelayanan administrasi perkantoran adalah kepuasan masyarakat/aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor.

Adapun Realisasi Kegiatan dapat di jabarkan dalam tabel berikut :

Tabel. 1

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	75	100	133

### 2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan

Pada Tahun 2021 Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan memiliki kegiatan yaitu sebagai berikut :

- Kegiatan Pembinaan Ideologi, dan Wawasan Kebangsaan di kalangan masyarakat dan mahasiswa di Kabupaten Cirebon
- Sosialisasi Perundang-Undangan Bagi Pemilih Pemula
- Sosialisasi Wawasan Kebangsaan melalui kegiatan Sarasehan Seni dan Budaya di Kabupaten Cirebon.



Adapun Realisasi Kegiatan dapat di jabarkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya penyelesaian pelanggaran norma agama, sosial dan adat	- Meningkatnya kualitas jiwa dan sikap wawasan kebangsaan bagi masyarakat untuk mencapai tujuan NKRI	82 % (3 Kegiatan)	100	121
		- Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		99	120
		- Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan Peningkatan Wawasan Kebangsaan		99,82	124,77

### 3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Pada Tahun 2021 Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik di laksanakan dua kegiatan dalam rangka meningkatkan pendidikan politik masyarakat.

Hasil yang diharapkan adalah meningkatnya partisipasi partai politik dan meningkatnya Pendidikan Politik Masyarakat. Dengan kegiatan yaitu sebagai berikut :



#### 4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Pada Tahun 2021 Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di selenggarakan melalui satu kegiatan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Cirebon. Hasil yang diharapkan adalah meningkatnya pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Cirebon. Dengan kegiatan yaitu sebagai berikut :

- Kegiatan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Cirebon

Adapun Realisasi Kegiatan dapat di jabarkan dalam tabel berikut :

Tabel 4.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya penyelesaian konflik sosial	- Jumlah Orang yang Diberi Pembinaan/ Sosialisasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Kabupaten Cirebon	83 % (1 Kegiatan)	94,55	113,9

#### 5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

Pada Tahun 2021 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya di selenggarakan melalui tiga kegiatan dalam rangka meningkatkan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Kabupaten Cirebon

Hasil yang diharapkan adalah meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Kabupaten Cirebon Dengan kegiatan yaitu sebagai berikut :

- Kegiatan fasilitasi dan koordinasi pembinaan Pencegahan Narkotika, dan terlaksananya Koordinasi FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Kabupaten Cirebon, serta sosialisasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)
- Koordinasi dan Laporan Terkait Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
- Monitoring Terkait Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, dan Monitoring Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Adapun Realisasi Kegiatan dapat di jabarkan dalam tabel berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya penyelesaian konflik sosial	- Jumlah Orang yang Diberi Pembinaan/Sosialisasi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Kabupaten Cirebon.	83 % (3Kegiatan)	121.48	146,36
		- Jumlah Koordinasi yang Dilakukan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Kabupaten Cirebon.		104.15	125,48
		- Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi,		116.67	140,56

		Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Kabupaten Cirebon			
--	--	--	--	--	--

## 6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Pada Tahun 2021 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial di selenggarakan melalui lima kegiatan dalam rangka meningkatkan Ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Cirebon.

Hasil yang diharapkan adalah meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Cirebon Dengan kegiatan yaitu sebagai berikut :

- Pembinaan pelatihan intelijen, Terbinanya eksnapiter dan keluarganya yang mendapatkan program deradikalisasi
- Pembentukan Tim FKDM Kabupaten Cirebon
- Koordinasi dan pembahasan bidang Ipoleksosbudhankam oleh Forkopimda

Adapun Realisasi Kegiatan dapat di jabarkan dalam tabel berikut :

Tabel.6

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya penyelesaian pergesekan ( friksi ) antar dan internal umat beragama	- Jumlah konflik yang ditangani, jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan Intelijen, jumlah Peserta Kewaspadaan Dini yang difasilitasi	80 % (5 Kegiatan)	108.83	136,03

		tingkat Kabupaten dan jumlah Keluarga Napiter, Eks Napiter dan Keluarganya yang mendapatkan program Deradikalisasi			
		- Jumlah Peserta Kewaspadaan Dini yang difasilitasi tingkat Masyarakat dan jumlah permasalahan yang ditangani Tim Wasdin Pemda		131.17	163,96
		- jumlah fasilitasi pembahasan dan koordinasi bidang Ipoleksosbudka m oleh Forkopimda		108.20	135,25
		- Jumlah Kejasama dan Pencegahan Kriminal yang dilakukan dan pengawasan keberadaan orang asing/lembaga asing/tenaga kerja asing dan		102.55	128,18
		- Jumlah Dokumen Pelaporan		72.66	90,82

		Pengawasan orang asing - Jumlah orang yang mendapatkan pengetahuan deteksi dan cegah dini keberadaan Pengawasan orang asing dan pencegahan tindak kejahatan	100	125
--	--	--	-----	-----

### C. Informasi Keuangan Terkait Pencapaian Sasaran

Dana yang dianggarkan dan realisasinya untuk mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dapat dirinci sebagai berikut :

URAIAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	PERSEN (%)
<b>BELANJA</b>	<b>Rp. 14.011.077.407,48</b>	<b>Rp.13.136.056.119,00</b>	<b>Rp. 875.021.288,48</b>	<b>93,75%</b>
<b>BELANJA NON URUSAN</b>	<b>Rp .4.668.608.607</b>	<b>Rp.4.290.772.462</b>	<b>Rp.377.836.145</b>	<b>91,90</b>
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Rp. 4.668.608.607</b>	<b>Rp .4.290.772.462</b>	<b>Rp.377.836.145</b>	<b>91,90</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Rp . 42.024.400	Rp.38.845.800	Rp. 3.178.600	92,43
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.34.114.600	Rp .31.924.000	Rp. 2.190.600	93,57
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 7.909.800	Rp .6.921.800	Rp.988.000	87,50
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Rp 3.923.211.700	Rp.3.600.370.383	Rp.322.841.317	91,77
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.3.908.430.000	Rp.3.585.798.683	Rp.322.631.317	91,74
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 8.356.400	Rp. 8.146.400	Rp. 0	100,0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	Rp.6.425.300	Rp.6.425.300	Rp. 0	100,0
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Rp.197.345.200	Rp.195.816.800	Rp.1.528.400	99,22

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 7.532.900	Rp.7.532.900	Rp. 0	100,0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 58.872.000	Rp. 57.571.600	Rp.1.300.400	97,79
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 6.102.900	Rp.6.102.900	Rp.0	100,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp.1.280.000	Rp. 1.280.000	Rp. 0	100,00
Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Rp. 23.956.800	Rp. 23.956.800	Rp.0	100,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 4.140.000	Rp.4.140.000	Rp.0	100,00
Penyediaan Bahan/Material	Rp.28.624.600	Rp.28.396.600	Rp.228.000	99,20
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp.11.280.000	Rp.11.280.000	Rp.0	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.55.556.000	Rp. 55.556.000	Rp. 0	100,00
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Rp .210.725 .366</b>	<b>Rp.208.271.000</b>	<b>Rp. 2.454.366</b>	<b>98,83</b>
Pengadaan Mebel	Rp .10.727.000	Rp. 9.421.000	Rp.1.306.000	87,82
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung dan Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp .199.998.366	Rp.198.850.000	Rp. 1.148.366	99,42
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp .91.564.320</b>	<b>Rp.56.383.008</b>	<b>Rp.56.383.008</b>	<b>61,57</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 77.394.320	Rp. 42.213.008	Rp.35.181.312	54,54
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp .14.170.000	Rp .14.170.000	Rp. 0	100
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Rp. 203.737.621	Rp.191.085.471	Rp.12.652.150	93,78
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.128.509.250	Rp.123.933.000	Rp.4.576.250	96,43
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.11.740.000	Rp.7.408.100	Rp. 4.331.900	63,10
Pemeliharaan Mebel	Rp.1.806.500	Rp.1.806.500	Rp .0	100,0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 61.681.871	Rp .57.937.871	Rp. 3.744.000	93,93
<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>REALISASI</b>	<b>SISA</b>	<b>PERSEN</b>



	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
<b>BELANJA URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Rp. 9.342.468.800</b>	<b>Rp. 8.845.283.657,-</b>	<b>Rp. 497.185.143</b>	94,67
<b>Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Rp. 308.034.100</b>	<b>Rp. 307.817.400</b>	<b>Rp. 216.700</b>	99,92
<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Rp. 308.034.100</b>	<b>Rp. 307.817.400</b>	<b>Rp. 216.700</b>	99,92
Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp.176.115.000	Rp.175.903.300	Rp.211.700	99,87
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp. 76.337.100	Rp. 76.337.100	Rp. 0	100
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rp. 55.582.000	Rp. 55.577.000	Rp. 5000	99,99
<b>Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>	<b>Rp. 4.410.861.000</b>	<b>Rp. 4.339.965.600</b>	<b>Rp.70.895.400</b>	98,39
<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</b>	<b>Rp. 4.410.861.000</b>	<b>Rp. 4.339.965.600</b>	<b>Rp.70.895.400</b>	98,39
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp .168.309.700	Rp .168.304.700	Rp.5.000	99,99
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Rp .4.242.551.300	Rp .4.171.660.900	Rp 70.890.400	98,32

<b>Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>Rp .581.584.800</b>	<b>Rp .549.862.050</b>	<b>Rp .31.722.750</b>	<b>94,54</b>
<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>Rp .581.584.800</b>	<b>Rp .549.862.050</b>	<b>Rp .31.722.750</b>	<b>94,54</b>
Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rp .581.584.800	Rp .549.862.050	Rp .31.722.750	94,54
<b>Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya</b>	<b>Rp .266.964.050</b>	<b>Rp. 266.223.050</b>	<b>Rp . 741.000</b>	99,72
<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>Rp .266.964.050</b>	<b>Rp. 266.223.050</b>	<b>Rp . 741.000</b>	99,72

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp. 96.624.300	Rp. 96.309.400	Rp. 314.900	99,67
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp. 133.087.750	Rp.133.011.650	Rp. 76.100	99,94
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Rp. 37.252.000	Rp. 36.902.000	Rp. 350.000	99,06

<b>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>Rp .3.775.024.850</b>	<b>Rp. 3.381.415.557</b>	<b>Rp 393.609.293</b>	89,57
<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik</b>	<b>Rp .3.775.024.850</b>	<b>Rp. 3.381.415.557</b>	<b>Rp 393.609.293</b>	89,57
Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp. 445.604.550	Rp.443.533.275	Rp. 2.071.275	99,53
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp. 140.800.500	Rp. 140.250.500	Rp. 550.000	99,60
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp. 488.333.300	Rp. 460.800.732	Rp.27.532.568	94,36
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rp. 200.286.500	Rp. 191.231.050	Rp. 9.055.450	95,47
Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.500.000.000	Rp. 2.145.600.000	Rp. 354.400.000	85,24
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 14.011.077.407,48,-</b>	<b>Rp.13.136.056.119,00,-</b>	<b>Rp. 875.021.288,48</b>	93,75%

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

---

LAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi selama tahun anggaran 2021. Laporan tersebut merupakan implementasi dari Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon Tahun 2021 dapat disimpulkan keberhasilan sasaran di tahun 2021 yang diukur dengan menggunakan indikator kinerja berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan rencana, menunjukkan capaian rata-rata indikator kinerja sasaran baik.

Dari hasil pengukuran kinerja nampak bahwa secara umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah berhasil mencapai target kinerja sasaran dan kegiatan serta telah dapat memenuhi fungsi yang dibebankan pada organisasi dari 5 (lima) sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Meskipun secara rata-rata capaian sasaran dan kegiatan sangat baik, namun belum seluruh target kinerja sasaran maupun kegiatan dapat dicapai seperti yang diharapkan. Hal ini tidak terlepas dari faktor-faktor lingkungan baik internal misalnya sosialisasi, mengukur, mencatat dan melaporkan kinerja yang terjamin integritas data dan ketepatan waktunya mesti terus ditingkatkan, maupun lingkungan eksternal misalnya kerjasama, sinergi dan kualitas komunikasi dengan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta lembaga atau pihak-pihak lainnya yang harus terus ditingkatkan, dengan demikian kinerja organisasi terutama capaian sasaran diharapkan dapat dicapai sesuai rencana yang ditetapkan.

## Saran

---

Sangat disadari masih diperlukan perbaikan agar dapat mempertahankan bahkan untuk meningkatkan kinerja yang telah dicapai organisasi. Adapun hal-hal yang perlu mendapat perhatian untuk tahun-tahun yang akan datang guna mencapai kinerja yang lebih baik dari setiap jajaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa, maka diperlukan :

1. Indikator kinerja kegiatan dan indikator program perlu disempurnakan secara terus menerus melalui upaya identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi secara terus menerus sehingga dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian program/kegiatan di masing-masing unit kerja pelaksana kegiatan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa.
2. Peningkatan pengkoordinasian di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik baik penyusunan perumusan kebijakan dan program kerja dalam pelaksanaan operasional pemerintah daerah.

# **LAMPIRAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. Hj . ITA ROHPITASARI, M.Si.  
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : Drs. H. IMRON, M.Ag  
Jabatan : Bupati Cirebon

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, November 2021

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

**Drs. H. IMRON, M.Ag**

**Dra. Hj . ITA ROHPITASARI, M.Si.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19660810 198709 2 001



**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja	
			Rumus	Tipe	Target		Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.	Meningkatkan Kondusifitas Masyarakat yang berwawasan kebangsaan	Penurunan Kejadian Konflik SARA, Sosial dan Agama	Jumlah kejadian atau Kasus	Kumulatif	Menurun	Laporan kejadian konflik SARA, sosial, dan agama	3 angka	3 angka
1.1.1.	Meningkatnya penyelesaian pergesekan ( friksi ) antar dan internal umat beragama	Prosentase Penyelesaian Friksi/Gesekan antar Umat Beragama	$\frac{\text{Jumlah Penyelesaian Friksi antar Internal Umat Beragama yang terselesaikan}}{\text{Jumlah Total Penyelesaian Friksi antar Internal Umat Beragama}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	Laporan kejadian konflik agama	80 persen	3 persen
1.1.2.	Meningkatnya penyelesaian konflik sosial	Prosentase Penyelesaian Konflik sosial	$\frac{\text{Jumlah kasus konflik sosial yang diselesaikan}}{\text{Jumlah total kasus konflik sosial}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	Laporan kejadian konflik sosial	83 persen	36 persen
1.1.3.	Meningkatnya penyelesaian pelanggaran norma agama, sosial dan adat	Penyelesaian pelanggaran norma agama, sosial dan adat	$\frac{\text{Jumlah pelanggaran norma agama, sosial dan adat}}{\text{Jumlah total pelanggaran norma agama, sosial dan adat}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	Laporan kejadian atau kasus pelanggaran norma agama, sosial, dan adat	82 Prosen	40 Prosen
1.1.4.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Non Kumulatif	Meningkat	Data hasil survey kepuasan masyarakat	75 Poin	75 Poin

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.1.1.06.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	4.034.805.320,00	3.775.024.850,00	Sumber Dana: DTU-DAU,DTU-DBH
1.1.2.04.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	636.936.300,00	581.584.800,00	Sumber Dana: DTU-DAU
1.1.2.05.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	314.808.650,00	266.964.050,00	Sumber Dana: DTU-DAU
1.1.3.02.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	319.998.800,00	308.034.100,00	Sumber Dana: ,DTU-DAU
1.1.3.03.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	4.318.417.900,00	4.410.861.000,00	Sumber Dana: DTU-DAU,DTU-DAU, DTU-DBH
1.1.4.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.467.413.741,00	4.668.608.607,48	Sumber Dana: DTU-DAU,DTU-DAU, PAD
<b>J U M L A H</b>		<b>13.092.380.711,00</b>	<b>14.011.077.407,48</b>	

Pihak Kedua  
Bupati Cirebon,

**Drs. H. IMRON, M.Ag**

Sumber, November 2021  
Pihak Kesatu  
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,

**Dra. Hj . ITA ROHPITASARI, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660810 198709 2 001





**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. WIWIN WINARNI, S.Sos, M.Si.  
Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : Dra. Hj . ITA ROHPITASARI, M.Si.  
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, November 2021

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

**Dra. Hj . ITA ROHPITASARI, M.Si.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19660810 198709 2 001

**Hj. WIWIN WINARNI, S.Sos, M.Si.**

Pembina Tk.I  
NIP. 19650226 198802 2 001



**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja	
			Rumus	Tipe	Target		Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.	Meningkatkan Kondusifitas Masyarakat yang berwawasan kebangsaan	Penurunan Kejadian Konflik SARA, Sosial dan Agama	Jumlah kejadian atau Kasus	Kumulatif	Menurun	Laporan kejadian konflik SARA, sosial, dan agama	3 angka	3 angka
1.1.4.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Non Kumulatif	Meningkat	Data hasil survey kepuasan masyarakat	75 Poin	75 Poin

No	Program	Indikator Kinerja (Outcome / Hasil)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja		Anggaran (Rp.)		Ket.
			Rumus	Tipe	Target		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.1.4.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang sesuai standar kebutuhan pelayanan prima	$\frac{\text{Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan}}{\text{Jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	Jumlah sarana dan prasarana yang ada dan yang dibutuhkan	52 Prosen	52 Prosen	70.877.371,00	288.383.737,48	Sumber Dana: DTU-DAU
		prosentase peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai dengan standar pelayanan	$\frac{\text{Jumlah pelayanan administrasi yang dilakukan (disediakan)}}{\text{Jumlah pelayanan administrasi yang dibutuhkan}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	Jumlah kegiatan pelayanan yang dilakukan	80 Prosen	80 Prosen	457.191.270,00	414.988.770,00	Sumber Dana: DTU-DAU
		Prosentase meningkatnya disiplin aparatur	$\frac{\text{Jumlah pegawai yang hadir sesuai jam kerja dan berpakaian sesuai ketentuan}}{\text{total pegawai}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	Data daftar kehadiran	91 Prosen	91 Prosen	2.882.509.000,00	3.908.430.000,00	Sumber Dana: DTU-DAU, PAD
		Prosentase meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang transparan akuntabel dan informatif	$\frac{\text{Jumlah laporan kinerja dan keuangan yg tervalidasi}}{\text{Jumlah total laporan kinerja dan keuangan ya seharusnya tervalidasi}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	Laporan kinerja dan keuangan	100 Prosen	100 Prosen	22.757.500,00	22.691.500,00	Sumber Dana: DTU-DAU
		Prosentase meningkatnya sistem perencanaan sektoral	$\frac{\text{Jumlah Laporan Perencanaan Sektoral Yang disusun}}{\text{Jumlah Laporan Perencanaan Sektoral Yang seharusnya Disusun}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	Data perencanaan sektoral	100 Prosen	100 Prosen	34.078.600,00	34.114.600,00	Sumber Dana: DTU-DAU
<b>J U M L A H</b>									<b>3.467.413.741,00</b>	<b>4.668.608.607,48</b>	

Pihak Kedua  
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,

**Dra. Hj . ITA ROHPITASARI, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660810 198709 2 001

Sumber, November 2021  
Pihak Kesatu  
Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,

**Hj. WIWIN WINARNI, S.Sos, M.Si.**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19650226 198802 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ADE KANDAR, S.Sos.  
Jabatan : Kepala Bidang Ideologi, Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : Dra. Hj . ITA ROHPITASARI, M.Si.  
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, November 2021

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

**Dra. Hj . ITA ROHPITASARI, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660810 198709 2 001

**ADE KANDAR, S.Sos.**  
Pembina  
NIP. 19670414 199103 1 008



**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja	
			Rumus	Tipe	Target		Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.	Meningkatkan Kondusifitas Masyarakat yang berwawasan kebangsaan	Penurunan Kejadian Konflik SARA, Sosial dan Agama	Jumlah kejadian atau Kasus	Kumulatif	Menurun	Laporan kejadian konflik SARA, sosial, dan agama	3 angka	3 angka
1.1.2.	Meningkatnya penyelesaian konflik sosial	Prosentase Penyelesaian Konflik sosial	$\frac{\text{Jumlah kasus konflik sosial yang diselesaikan}}{\text{Jumlah total kasus konflik sosial}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	Laporan kejadian konflik sosial	83 persen	36 persen
1.1.3.	Meningkatnya penyelesaian pelanggaran norma agama, sosial dan adat	Penyelesaian pelanggaran norma agama, sosial dan adat	$\frac{\text{Jumlah pelanggaran norma agama, sosial dan adat}}{\text{Jumlah total pelanggaran norma agama, sosial dan adat}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	Laporan kejadian atau kasus pelanggaran norma agama, sosial, dan adat	82 Prosen	40 Prosen

No	Program	Indikator Kinerja (Outcome / Hasil)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja		Anggaran (Rp.)		Ket.
			Rumus	Tipe	Target		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.1.2.05.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Prosentase Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	$\frac{\text{Jumlah pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang dilakukan}}{\text{Jumlah pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang harus dilakukan}} \times 100\%$	Kumulatif	Meningkat	Jumlah Kegiatan dan Peserta yang Memperoleh Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	20 Prosen	20 Prosen	314.808.650,00	215.954.200,00	Sumber Dana: DTU-DAU
1.1.3.02.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Prosentase meningkatnya wawasan kebangsaan warga negara	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang mengikuti peningkatan wawasan kebangsaan}}{\text{Jumlah warga negara seluruhnya}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	Jumlah akumulasi warga negara yang mengikuti peningkatan wawasan kebangsaan	15 Prosen	15 Prosen	264.416.800,00	142.932.400,00	Sumber Dana: DTU-DAU
		Prosentase meningkatnya kemitraan dalam berwawasan kebangsaan	$\frac{\text{Jumlah forum - forum kemitraan wawasan kebangsaan yang dilakukan}}{\text{Jumlah forum - forum kemitraan kebangsaan yang seharusnya}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	Data forum-forum diskusi, even untuk peningkatan wawasan kebangsaan	12 Prosen	12 Prosen	55.582.000,00	55.582.000,00	Sumber Dana: DTU-DAU
<b>J U M L A H</b>									<b>634.807.450,00</b>	<b>414.468.600,00</b>	

Pihak Kedua  
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,

**Dra. Hj . ITA ROHPITASARI, M.Si.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19660810 198709 2 001

Sumber, November 2021  
Pihak Kesatu  
Kepala Bidang Ideologi, Wawasan kebangsaan dan  
Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama,

**ADE KANDAR, S.Sos.**

Pembina  
NIP. 19670414 199103 1 008



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MAMAN RUKMANA, ST.  
Jabatan : Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : Dra. Hj . ITA ROHPITASARI, M.Si.  
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, November 2021

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

**Dra. Hj . ITA ROHPITASARI, M.Si.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19660810 198709 2 001

**MAMAN RUKMANA, ST.**

Pembina  
NIP. 19680712 199803 1 012



**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja	
			Rumus	Tipe	Target		Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.	Meningkatkan Kondusifitas Masyarakat yang berwawasan kebangsaan	Penurunan Kejadian Konflik SARA, Sosial dan Agama	Jumlah kejadian atau Kasus	Kumulatif	Menurun	Laporan kejadian konflik SARA, sosial, dan agama	3 angka	3 angka
1.1.1.	Meningkatnya penyelesaian pergesekan ( friksi ) antar dan internal umat beragama	Prosentase Penyelesaian Friksi/Gesekan antar Umat Beragama	$\frac{\text{Jumlah Penyelesaian Friksi antar Internal Umat Beragama yang terselesaikan}}{\text{Jumlah Total Penyelesaian Friksi antar Internal Umat Beragama}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	Laporan kejadian konflik agama	80 persen	3 persen

No	Program	Indikator Kinerja (Outcome / Hasil)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja		Anggaran (Rp.)		Ket.
			Rumus	Tipe	Target		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.1.1.06.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Prosentase Peningkatan keamanan dan kenyamanan Lingkungan yang dilakukan	$\frac{\text{Jumlah Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Yang dilakukan}}{\text{Jumlah Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan yang dibutuhkan}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Menurun	Jumlah tindakan / kegiatan keamanan dan kenyamanan lingkungan yang dilakukan	10 Prosen	10 Prosen	3.002.023.200,00	2.834.459.900,00	Sumber Dana: DTU-DAU, DTU-DBH
		Prosentase meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum dalam kerangka kesatuan berbangsa	$\frac{\text{Jumlah pelanggaran ketertiban umum yang dapat dicegah}}{\text{Jumlah pelanggaran ketertiban umum yang terjadi}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Menurun	Data kejadian pelanggaran ketertiban umum dan upaya pencegahan dininya	16 Prosen	16 Prosen	1.032.782.120,00	630.035.850,00	Sumber Dana: DTU-DAU, DTU-DBH
<b>J U M L A H</b>									<b>4.034.805.320,00</b>	<b>3.464.495.750,00</b>	

Pihak Kedua  
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,

Sumber, November 2021  
Pihak Kesatu  
Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik,

**Dra. Hj . ITA ROHPITASARI, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660810 198709 2 001

**MAMAN RUKMANA, ST.**  
Pembina  
NIP. 19680712 199803 1 012





**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JUJU JUHARIAH, SAP.,M.A.P.  
Jabatan : Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : Dra. Hj . ITA ROHPITASARI, M.Si.  
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, November 2021

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

**Dra. Hj . ITA ROHPITASARI, M.Si.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19660810 198709 2 001

**JUJU JUHARIAH, SAP.,M.A.P.**

Pembina  
NIP. 19701029 199901 2 001



**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja	
			Rumus	Tipe	Target		Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.	Meningkatkan Kondusifitas Masyarakat yang berwawasan kebangsaan	Penurunan Kejadian Konflik SARA, Sosial dan Agama	Jumlah kejadian atau Kasus	Kumulatif	Menurun	Laporan kejadian konflik SARA, sosial, dan agama	3 angka	3 angka
1.1.2.	Meningkatnya penyelesaian konflik sosial	Prosentase Penyelesaian Konflik sosial	$\frac{\text{Jumlah kasus konflik sosial yang diselesaikan}}{\text{Jumlah total kasus konflik sosial}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	Laporan kejadian konflik sosial	83 persen	36 persen
1.1.3.	Meningkatnya penyelesaian pelanggaran norma agama, sosial dan adat	Penyelesaian pelanggaran norma agama, sosial dan adat	$\frac{\text{Jumlah pelanggaran norma agama, sosial dan adat}}{\text{Jumlah total pelanggaran norma agama, sosial dan adat}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	Laporan kejadian atau kasus pelanggaran norma agama, sosial, dan adat	82 Prosen	40 Prosen

No	Program	Indikator Kinerja (Outcome / Hasil)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja		Anggaran (Rp.)		Ket.
			Rumus	Tipe	Target		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.1.2.04.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Prosentase Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	$\frac{\text{Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Ormas yang Dilakukan}}{\text{Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Ormas yang Harus Dilakukan}} \times 100\%$	Kumulatif	Meningkat	Jumlah Ormas yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan	15 Prosen	15 Prosen	636.936.300,00	506.763.050,00	Sumber Dana: DTU-DAU
1.1.3.03.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Prosentase peningkatan kualitas pendidikan politik masyarakat	$\frac{\text{Jumlah kegiatan pendidikan politik untuk masyarakat}}{\text{Jumlah kegiatan pendidikan politik yang seharusnya dilakukan di masyarakat}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	Data sosialisasi, kegiatan pendidikan politik yang disampaikan/dilakukan ke masyarakat	82 Prosen	82 Prosen	4.318.417.900,00	3.664.853.400,00	Sumber Dana: DTU-DAU, DTU-DBH
<b>J U M L A H</b>									<b>4.955.354.200,00</b>	<b>4.171.616.450,00</b>	

Pihak Kedua  
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,

**Dra. Hj . ITA ROHPITASARI, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660810 198709 2 001

Sumber, November 2021  
Pihak Kesatu  
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi  
Kemasyarakatan,

**JUJU JUHARIAH, SAP.,M.A.P.**  
Pembina  
NIP. 19701029 199901 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOCHAMMAD NURHIYANA, S.STP., M.Si.  
Jabatan : Kepala Subbidang Politik Dalam Negeri pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : JUJU JUHARIAH, SAP.,M.A.P.  
Jabatan : Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, November 2021

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

**JUJU JUHARIAH, SAP.,M.A.P.**  
Pembina  
NIP. 19701029 199901 2 001

**MOCHAMMAD NURHIYANA, S.STP.,  
M.Si.**  
Pembina  
NIP. 19840227 200312 1 001



**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja	
			Rumus	Tipe	Target		Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.	Meningkatkan Kondusifitas Masyarakat yang berwawasan kebangsaan	Penurunan Kejadian Konflik SARA, Sosial dan Agama	Jumlah kejadian atau Kasus	Kumulatif	Menurun	Laporan kejadian konflik SARA, sosial, dan agama	3 angka	3 angka
1.1.3.	Meningkatnya penyelesaian pelanggaran norma agama, sosial dan adat	Penyelesaian pelanggaran norma agama, sosial dan adat	$\frac{\text{Jumlah pelanggaran norma agama, sosial dan adat}}{\text{Jumlah total pelanggaran norma agama, sosial dan adat}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	Laporan kejadian atau kasus pelanggaran norma agama, sosial, dan adat	82 Prosen	40 Prosen

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Output / Keluaran)	Target Kinerja		Anggaran		Keterangan
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>1.1.3.03.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>				<b>4.318.417.900,00</b>	<b>3.664.853.400,00</b>	
<b>1.1.3.03.2.01.</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, Perwaki	1 BA	1 BA	<b>4.318.417.900,00</b>	<b>3.664.853.400,00</b>	-
1.1.3.03.2.01.01.	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Meningkatnya kualitas jiwa dan sikap wawasan kebangsaan bagi masyarakat untuk mencapai tujuan NKRI	726 orang	orang	0,00	0,00	-
1.1.3.03.2.01.03.	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah peserta yang diberikan sosialisasi pendidikan politik, etika budaya politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	400 orang	400 orang	109.956.900,00	109.956.900,00	Sumber Dana: DTU-DAU
1.1.3.03.2.01.05.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah peserta bimtek bendahara keuang parpol, jumlah kegiatan sosialisasi pencegahan friksi di masyarakat, Jumlah kegiatan pemantauan perkembangan politik, Jumlah hibah bantuan keuangan parpol, Jumlah hibah bantuan KPU/Bawaslu	15 prosentase	15 prosentase	4.208.461.000,00	3.554.896.500,00	Sumber Dana: DTU-DAU, DTU-DBH
<b>J U M L A H</b>					<b>4.318.417.900,00</b>	<b>3.664.853.400,00</b>	

Pihak Kedua  
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi  
Kemasyarakatan,

**JUJU JUHARIAH, SAP.,M.A.P.**

Pembina  
NIP. 19701029 199901 2 001

Sumber, November 2021  
Pihak Kesatu  
Kepala Subbidang Politik Dalam Negeri pada Bidang  
Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan,

**MOHAMMAD NURHIYANA, S.STP., M.Si.**

Pembina  
NIP. 19840227 200312 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KOMSIYA, S.Sos.  
Jabatan : Kepala Subbidang Organisasi Kemasyarakatan pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : JUJU JUHARIAH, SAP.,M.A.P.  
Jabatan : Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, November 2021

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

**JUJU JUHARIAH, SAP.,M.A.P.**

Pembina  
NIP. 19701029 199901 2 001

**KOMSIYA, S.Sos.**

Penata Tk.I  
NIP. 19631124 199009 1 001



**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja	
			Rumus	Tipe	Target		Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.	Meningkatkan Kondusifitas Masyarakat yang berwawasan kebangsaan	Penurunan Kejadian Konflik SARA, Sosial dan Agama	Jumlah kejadian atau Kasus	Kumulatif	Menurun	Laporan kejadian konflik SARA, sosial, dan agama	3 angka	3 angka
1.1.2.	Meningkatnya penyelesaian konflik sosial	Prosentase Penyelesaian Konflik sosial	$\frac{\text{Jumlah kasus konflik sosial yang diselesaikan}}{\text{Jumlah total kasus konflik sosial}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	Laporan kejadian konflik sosial	83 prosen	36 prosen

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Output / Keluaran)	Target Kinerja		Anggaran		Keterangan
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>1.1.2.04.</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>				<b>636.936.300,00</b>	<b>506.763.050,00</b>	
<b>1.1.2.04.2.01.</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1 BA	1 BA	<b>636.936.300,00</b>	<b>506.763.050,00</b>	-
1.1.2.04.2.01.01.	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Kabupaten Cirebon	2 Dok	Dok	0,00	0,00	-
1.1.2.04.2.01.02.	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tersusunnya Draft Keputusan/ Peraturan Bupati di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Kabupaten Cirebon	2 Drat Keputusan	Drat Keputusan	0,00	0,00	-
1.1.2.04.2.01.03.	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Diberi Pembinaan/ Sosialisasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Kabupaten Cirebon	1856 orang	1856 orang	636.936.300,00	506.763.050,00	Sumber Dana: DTU-DAU
1.1.2.04.2.01.04.	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Kabupaten Cirebon	8 Kali	Kali	0,00	0,00	-
<b>J U M L A H</b>					<b>636.936.300,00</b>	<b>506.763.050,00</b>	

Pihak Kedua  
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi  
Kemasyarakatan,

**JUJU JUHARIAH, SAP.,M.A.P.**

Pembina  
NIP. 19701029 199901 2 001

Sumber, November 2021  
Pihak Kesatu  
Kepala Subbidang Organisasi Kemasyarakatan pada  
Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi  
Kemasyarakatan,

**KOMSIYA, S.Sos.**

Penata Tk.I  
NIP. 19631124 199009 1 001





**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MASTARI, S.IP.  
Jabatan : Kepala Subbagian Keuangan dan Aset pada Sekretariat

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : Hj. WIWIN WINARNI, S.Sos, M.Si.  
Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, November 2021

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

**Hj. WIWIN WINARNI, S.Sos, M.Si.**

Pembina Tk.I  
NIP. 19650226 198802 2 001

**MASTARI, S.IP.**

Penata Tk.I  
NIP. 19641219 198602 1 001



**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja	
			Rumus	Tipe	Target		Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.	Meningkatkan Kondusifitas Masyarakat yang berwawasan kebangsaan	Penurunan Kejadian Konflik SARA, Sosial dan Agama	Jumlah kejadian atau Kasus	Kumulatif	Menurun	Laporan kejadian konflik SARA, sosial, dan agama	3 angka	3 angka
1.1.4.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Non Kumulatif	Meningkat	Data hasil survey kepuasan masyarakat	75 Poin	75 Poin

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Output / Keluaran)	Target Kinerja		Anggaran		Keterangan
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>1.1.4.01.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				<b>2.897.356.700,00</b>	<b>3.923.211.700,00</b>	
<b>1.1.4.01.2.02.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 BA	1 BA	<b>2.897.356.700,00</b>	<b>3.923.211.700,00</b>	-
1.1.4.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan	17 Pegawai	17 Pegawai	2.882.509.000,00	3.908.430.000,00	Sumber Dana: DTU-DAU, PAD
1.1.4.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Pelaporan Akhir Tahun yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	8.356.400,00	8.356.400,00	Sumber Dana: DTU-DAU
1.1.4.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	6.491.300,00	6.425.300,00	Sumber Dana: DTU-DAU
<b>J U M L A H</b>					<b>2.897.356.700,00</b>	<b>3.923.211.700,00</b>	

Pihak Kedua  
Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,

Sumber, November 2021  
Pihak Kesatu  
Kepala Subbagian Keuangan dan Aset pada Sekretariat,

**Hj. WIWIN WINARNI, S.Sos, M.Si.**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19650226 198802 2 001

**MASTARI, S.IP.**  
Penata Tk.I  
NIP. 19641219 198602 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZAMRONI ALHADI, SE.  
Jabatan : Kepala Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama pada Bidang Ideologi, Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : ADE KANDAR, S.Sos.  
Jabatan : Kepala Bidang Ideologi, Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, November 2021

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

**ADE KANDAR, S.Sos.**  
Pembina  
NIP. 19670414 199103 1 008

**ZAMRONI ALHADI, SE.**  
Penata Tk.I  
NIP. 19710828 200604 1 014



**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja	
			Rumus	Tipe	Target		Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.	Meningkatkan Kondusifitas Masyarakat yang berwawasan kebangsaan	Penurunan Kejadian Konflik SARA, Sosial dan Agama	Jumlah kejadian atau Kasus	Kumulatif	Menurun	Laporan kejadian konflik SARA, sosial, dan agama	3 angka	3 angka
1.1.2.	Meningkatnya penyelesaian konflik sosial	Presentase Penyelesaian Konflik sosial	$\frac{\text{Jumlah kasus konflik sosial yang diselesaikan}}{\text{Jumlah total kasus konflik sosial}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	Laporan kejadian konflik sosial	83 prosen	36 prosen

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Output / Keluaran)	Target Kinerja		Anggaran		Keterangan
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>1.1.2.05.</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>				<b>314.808.650,00</b>	<b>215.954.200,00</b>	
<b>1.1.2.05.2.01.</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya</b>	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	1 BA	1 BA	<b>314.808.650,00</b>	<b>215.954.200,00</b>	-
1.1.2.05.2.01.01.	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tersusunnya Program Kerja Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Kabupaten Cirebon	3 Dok	Dok	0,00	0,00	-
1.1.2.05.2.01.02.	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tersusunnya Draft Keputusan / Peraturan Bupati Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Kabupaten Cirebon	3 Draft Keputusan	Draft Keputusan	0,00	0,00	-
1.1.2.05.2.01.03.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Diberi Pembinaan/Sosialisasi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Kabupaten Cirebon.	2900 orang	2900 orang	103.961.700,00	72.624.700,00	Sumber Dana: DTU-DAU
1.1.2.05.2.01.04.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Koordinasi yang Dilakukan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Kabupaten Cirebon.	46 Dok	46 Dok	172.570.750,00	111.577.500,00	Sumber Dana: DTU-DAU
1.1.2.05.2.01.05.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Kabupaten Cirebon	6 Unit	6 Unit	38.276.200,00	31.752.000,00	Sumber Dana: DTU-DAU

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Output / Keluaran)	Target Kinerja		Anggaran		Keterangan
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			<b>J U M L A H</b>		<b>314.808.650,00</b>	<b>215.954.200,00</b>	

Pihak Kedua  
Kepala Bidang Ideologi, Wawasan kebangsaan dan Ketahanan  
Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama,

**ADE KANDAR, S.Sos.**  
Pembina  
NIP. 19670414 199103 1 008

Sumber, November 2021  
Pihak Kesatu  
Kepala Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya  
dan Agama pada Bidang Ideologi, Wawasan  
kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya  
dan Agama,

**ZAMRONI ALHADI, SE.**  
Penata Tk.I  
NIP. 19710828 200604 1 014



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ENDANG SUBIYATNO, SP.

Jabatan : Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : Hj. WIWIN WINARNI, S.Sos, M.Si.

Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, November 2021

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

**Hj. WIWIN WINARNI, S.Sos, M.Si.**

Pembina Tk.I

NIP. 19650226 198802 2 001

**ENDANG SUBIYATNO, SP.**

Penata Tk.I

NIP. 19750630 200501 1 004



**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja	
			Rumus	Tipe	Target		Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.	Meningkatkan Kondusifitas Masyarakat yang berwawasan kebangsaan	Penurunan Kejadian Konflik SARA, Sosial dan Agama	Jumlah kejadian atau Kasus	Kumulatif	Menurun	Laporan kejadian konflik SARA, sosial, dan agama	3 angka	3 angka
1.1.4.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Non Kumulatif	Meningkat	Data hasil survey kepuasan masyarakat	75 Poin	75 Poin

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Output / Keluaran)	Target Kinerja		Anggaran		Keterangan
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>1.1.4.01.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				<b>41.988.400,00</b>	<b>42.024.400,00</b>	
<b>1.1.4.01.2.01.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 BA	1 BA	<b>41.988.400,00</b>	<b>42.024.400,00</b>	-
1.1.4.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Sektor yang disusun	6 Dokumen	6 Dokumen	34.078.600,00	34.114.600,00	Sumber Dana: DTU-DAU
1.1.4.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja Lakip dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang disusun	5 Dokumen	5 Dokumen	7.909.800,00	7.909.800,00	Sumber Dana: DTU-DAU
			<b>J U M L A H</b>		<b>41.988.400,00</b>	<b>42.024.400,00</b>	

Pihak Kedua  
Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,

Sumber, November 2021  
Pihak Kesatu  
Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan  
pada Sekretariat,

**Hj. WIWIN WINARNI, S.Sos, M.Si.**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19650226 198802 2 001

**ENDANG SUBIYATNO, SP.**  
Penata Tk.I  
NIP. 19750630 200501 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AKHMAD RODI SAKHO, S.IP.,M.Si.  
Jabatan : Kepala Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelejen pada Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : MAMAN RUKMANA, ST.  
Jabatan : Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, November 2021

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

**MAMAN RUKMANA, ST.**  
Pembina  
NIP. 19680712 199803 1 012

**AKHMAD RODI SAKHO, S.IP.,M.Si.**  
Penata Tk.I  
NIP. 19880930 200701 1 001





**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja	
			Rumus	Tipe	Target		Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.	Meningkatkan Kondusifitas Masyarakat yang berwawasan kebangsaan	Penurunan Kejadian Konflik SARA, Sosial dan Agama	Jumlah kejadian atau Kasus	Kumulatif	Menurun	Laporan kejadian konflik SARA, sosial, dan agama	3 angka	3 angka
1.1.1.	Meningkatnya penyelesaian pergesekan ( friksi ) antar dan internal umat beragama	Prosentase Penyelesaian Friksi/Gesekan antar Umat Beragama	$\frac{\text{Jumlah Penyelesaian Friksi antar Internal Umat Beragama yang terselesaikan}}{\text{Jumlah Total Penyelesaian Friksi antar Internal Umat Beragama}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	Laporan kejadian konflik agama	80 prosen	3 prosen

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Output / Keluaran)	Target Kinerja		Anggaran		Keterangan
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1 BA	1 BA	0,00	0,00	-
<b>1.1.1.06.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>				<b>819.085.220,00</b>	<b>495.694.350,00</b>	
<b>1.1.1.06.2.01.</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1 BA	1 BA	<b>819.085.220,00</b>	<b>495.694.350,00</b>	-
1.1.1.06.2.01.01.	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah kebijakan teknis yang dibuat dalam rangka cipta kondisi kondusifitas Situasi Keamanan Wilayah di Kabupaten Cirebon	kebijakan / hasil Anev	kebijakan / hasil Anev	0,00	0,00	-
1.1.1.06.2.01.02.	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah konflik yang ditangani, jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan Intelijen, jumlah Peserta Kewaspadaan Dini yang difasilitasi tingkat Kabupaten dan jumlah Keluarga Napiter, Eks Napiter dan Keluarganya yang mendapatkan program Deradikalisasi	521 orang	521 orang	702.021.320,00	406.290.450,00	Sumber Dana: DTU-DAU
1.1.1.06.2.01.03.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Peserta Kewaspadaan Dini yang difasilitasi tingkat Masyarakat dan jumlah permasalahan yang ditangani Tim Wasdin Pemda	200 orang	200 orang	117.063.900,00	89.403.900,00	Sumber Dana: DTU-DAU
<b>J U M L A H</b>					<b>819.085.220,00</b>	<b>495.694.350,00</b>	

Pihak Kedua  
Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik,

**MAMAN RUKMANA, ST.**  
Pembina  
NIP. 19680712 199803 1 012

Sumber, November 2021  
Pihak Kesatu  
Kepala Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama  
Intelejen pada Bidang Kewaspadaan Nasional dan  
Penanganan Konflik,

**AKHMAD RODI SAKHO, S.IP.,M.Si.**  
Penata Tk.I  
NIP. 19880930 200701 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RADEN BUDI SETYAWAN, SE, MM.  
Jabatan : Kepala Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan pada Bidang Ideologi, Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : ADE KANDAR, S.Sos.  
Jabatan : Kepala Bidang Ideologi, Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, November 2021

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

**ADE KANDAR, S.Sos.**  
Pembina  
NIP. 19670414 199103 1 008

**RADEN BUDI SETYAWAN, SE, MM.**  
Penata  
NIP. 19760115 201001 1 001



**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja	
			Rumus	Tipe	Target		Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.	Meningkatkan Kondusifitas Masyarakat yang berwawasan kebangsaan	Penurunan Kejadian Konflik SARA, Sosial dan Agama	Jumlah kejadian atau Kasus	Kumulatif	Menurun	Laporan kejadian konflik SARA, sosial, dan agama	3 angka	3 angka
1.1.3.	Meningkatnya penyelesaian pelanggaran norma agama, sosial dan adat	Penyelesaian pelanggaran norma agama, sosial dan adat	$\frac{\text{Jumlah pelanggaran norma agama, sosial dan adat}}{\text{Jumlah total pelanggaran norma agama, sosial dan adat}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	Laporan kejadian atau kasus pelanggaran norma agama, sosial, dan adat	82 Prosen	40 Prosen

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Output / Keluaran)	Target Kinerja		Anggaran		Keterangan
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>1.1.3.02.</b>	<b>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>				<b>319.998.800,00</b>	<b>198.514.400,00</b>	
<b>1.1.3.02.2.01.</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1 BA	1 BA	<b>319.998.800,00</b>	<b>198.514.400,00</b>	-
1.1.3.02.2.01.01.	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Meningkatnya kualitas jiwa dan sikap wawasan kebangsaan bagi masyarakat untuk mencapai tujuan NKRI	1 -	1 -	188.079.700,00	142.932.400,00	Sumber Dana: DTU-DAU
1.1.3.02.2.01.03.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	176 Orang	Orang	76.337.100,00	0,00	-
1.1.3.02.2.01.05.	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan Peningkatan Wawasan Kebangsaan	544 Orang	544 Orang	55.582.000,00	55.582.000,00	Sumber Dana: DTU-DAU
<b>J U M L A H</b>					<b>319.998.800,00</b>	<b>198.514.400,00</b>	

Pihak Kedua  
Kepala Bidang Ideologi, Wawasan kebangsaan dan Ketahanan  
Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama,

**ADE KANDAR, S.Sos.**  
Pembina  
NIP. 19670414 199103 1 008

Sumber, November 2021  
Pihak Kesatu  
Kepala Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan  
pada Bidang Ideologi, Wawasan kebangsaan dan  
Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama,

**RADEN BUDI SETYAWAN, SE, MM.**  
Penata  
NIP. 19760115 201001 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TEGUH BUDIMAN, SE.  
Jabatan : Kepala Subbidang Penanganan Konflik pada Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : MAMAN RUKMANA, ST.  
Jabatan : Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, November 2021

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

**MAMAN RUKMANA, ST.**

Pembina  
NIP. 19680712 199803 1 012

**TEGUH BUDIMAN, SE.**

Penata  
NIP. 19780819 200701 1 007



**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja	
			Rumus	Tipe	Target		Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.	Meningkatkan Kondusifitas Masyarakat yang berwawasan kebangsaan	Penurunan Kejadian Konflik SARA, Sosial dan Agama	Jumlah kejadian atau Kasus	Kumulatif	Menurun	Laporan kejadian konflik SARA, sosial, dan agama	3 angka	3 angka
1.1.1.	Meningkatnya penyelesaian pergesekan ( friksi ) antar dan internal umat beragama	Prosentase Penyelesaian Friksi/Gesekan antar Umat Beragama	$\frac{\text{Jumlah Penyelesaian Friksi antar Internal Umat Beragama yang terselesaikan}}{\text{Jumlah Total Penyelesaian Friksi antar Internal Umat Beragama}} \times 100\%$	Non Kumulatif	Meningkat	Laporan kejadian konflik agama	80 prosen	3 prosen

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Output / Keluaran)	Target Kinerja		Anggaran		Keterangan
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>1.1.1.06.</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>				<b>3.215.720.100,00</b>	<b>2.968.801.400,00</b>	
<b>1.1.1.06.2.01.</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1 BA	1 BA	<b>3.215.720.100,00</b>	<b>2.968.801.400,00</b>	-
1.1.1.06.2.01.04.	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	jumlah fasilitasi pembahasan dan koordinasi bidang Ipoleksosbudkam oleh Forkopimda	366 orang	366 orang	502.023.200,00	334.459.900,00	Sumber Dana: DTU-DAU
1.1.1.06.2.01.05.	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Pengawasan orang asing	kejadian	235 kejadian	0,00	0,00	Sumber Dana: DTU-DAU
		Jumlah Kejasama dan Pencegahan Kriminal yang dilakukan dan pengawasan keberadaan orang asing/lembaga asing/tenaga kerja asing dan Jumlah Dokumen Pelaporan Pengawasan orang asing	235 Orang	235 Orang	213.696.900,00	134.341.500,00	Sumber Dana: DTU-DAU
1.1.1.06.2.01.06.	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah instansi vertikal Forkopimda yang difasilitasi dalam rangka peningkatan koordinasi dan sinergitas dengan Pemkab Cirebon	4 instansi	4 instansi	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	Sumber Dana: DTU-DBH
<b>J U M L A H</b>					<b>3.215.720.100,00</b>	<b>2.968.801.400,00</b>	

Pihak Kedua  
Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik,

**MAMAN RUKMANA, ST.**  
Pembina  
NIP. 19680712 199803 1 012

Sumber, November 2021  
Pihak Kesatu  
Kepala Subbidang Penanganan Konflik pada Bidang  
Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik,

**TEGUH BUDIMAN, SE.**  
Penata  
NIP. 19780819 200701 1 007





**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : CANDRA PERMANA, ST.  
Jabatan : Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : Hj. WIWIN WINARNI, S.Sos, M.Si.  
Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sumber, November 2021

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

**Hj. WIWIN WINARNI, S.Sos, M.Si.**

Pembina Tk.I  
NIP. 19650226 198802 2 001

**CANDRA PERMANA, ST.**

Penata  
NIP. 19810410 201101 1 003



**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Impact / Dampak)	Perhitungan			Sumber Data	Target Kinerja	
			Rumus	Tipe	Target		Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.	Meningkatkan Kondusifitas Masyarakat yang berwawasan kebangsaan	Penurunan Kejadian Konflik SARA, Sosial dan Agama	Jumlah kejadian atau Kasus	Kumulatif	Menurun	Laporan kejadian konflik SARA, sosial, dan agama	3 angka	3 angka
1.1.4.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Non Kumulatif	Meningkat	Data hasil survey kepuasan masyarakat	75 Poin	75 Poin

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Output / Keluaran)	Target Kinerja		Anggaran		Keterangan
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>1.1.4.01.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				<b>528.068.641,00</b>	<b>703.372.507,48</b>	
<b>1.1.4.01.2.05.</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 BA	1 BA	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
1.1.4.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang disediakan	35 Stell	Stell	0,00	0,00	-
<b>1.1.4.01.2.06.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 BA	1 BA	<b>243.032.700,00</b>	<b>197.345.200,00</b>	-
1.1.4.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan yang disediakan	8 jenis	8 jenis	7.532.900,00	7.532.900,00	Sumber Dana: DTU-DAU
1.1.4.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor selama 1 tahun yang disediakan	4 unit	4 unit	58.872.000,00	58.872.000,00	Sumber Dana: DTU-DAU
1.1.4.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	13 buah	13 buah	6.102.900,00	6.102.900,00	Sumber Dana: DTU-DAU
1.1.4.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	1 -	1 -	1.280.000,00	1.280.000,00	Sumber Dana: DTU-DAU
1.1.4.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetak dan Penggandaan yang disediakan	18 jenis	18 jenis	23.956.800,00	23.956.800,00	Sumber Dana: DTU-DAU
1.1.4.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Perundang - perundangan yang disediakan	3 jenis	3 jenis	4.140.000,00	4.140.000,00	Sumber Dana: DTU-DAU
1.1.4.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material yang disediakan	49 jenis	49 jenis	28.624.600,00	28.624.600,00	Sumber Dana: DTU-DAU
1.1.4.01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan, minum, dan snack rapat dan tamu yang disediakan	3 dus	3 dus	11.280.000,00	11.280.000,00	Sumber Dana: DTU-DAU
1.1.4.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam dan keluar daerah yang disediakan	45 kali	45 kali	101.243.500,00	55.556.000,00	Sumber Dana: DTU-DAU

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (Output / Keluaran)	Target Kinerja		Anggaran		Keterangan
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>1.1.4.01.2.07.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 BA	1 BA	<b>10.727.000,00</b>	<b>210.725.366,48</b>	-
1.1.4.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeleur yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	10.727.000,00	10.727.000,00	Sumber Dana: DTU-DAU
1.1.4.01.2.07.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Luas Halaman Kantor yang ditata, parkir, musholla, taman	m2	461 m2	0,00	199.998.366,48	Sumber Dana: DTU-DAU
<b>1.1.4.01.2.08.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 BA	5 BA	<b>91.564.320,00</b>	<b>91.564.320,00</b>	-
1.1.4.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan	3 Jenis	3 Jenis	77.394.320,00	77.394.320,00	Sumber Dana: DTU-DAU
1.1.4.01.2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	5 unit	5 unit	14.170.000,00	14.170.000,00	Sumber Dana: DTU-DAU
<b>1.1.4.01.2.09.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 BA	1 BA	<b>182.744.621,00</b>	<b>203.737.621,00</b>	-
1.1.4.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan dan perijinan kendaraan yang dibayarkan	22 unit	1 unit	128.509.250,00	128.509.250,00	Sumber Dana: DTU-DAU
1.1.4.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan yang dibayarkan	21 Unit	21 Unit	8.255.000,00	11.740.000,00	Sumber Dana: DTU-DAU
1.1.4.01.2.09.05.	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan Berkala Mebeleur yang dilakukan	6 jenis	6 jenis	1.806.500,00	1.806.500,00	Sumber Dana: DTU-DAU
1.1.4.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor yang dilakukan	7 jenis	7 jenis	44.173.871,00	61.681.871,00	Sumber Dana: DTU-DAU
<b>J U M L A H</b>					<b>528.068.641,00</b>	<b>703.372.507,48</b>	

Pihak Kedua  
Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,

Sumber, November 2021  
Pihak Kesatu  
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada  
Sekretariat,

**Hj. WIWIN WINARNI, S.Sos, M.Si.**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19650226 198802 2 001

**CANDRA PERMANA, ST.**  
Penata  
NIP. 19810410 201101 1 003

## PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021

**SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon**  
**Tahun : 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	(%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	% (1 SKPD)	75	100	133%
2	Meningkatnya penyelesaian pergesekan ( friksi ) antar dan internal umat beragama	Prosentase Penyelesaian Friksi/Gesekan antar Umat Beragama	% (5 Kegiatan)	80	89,57	112%
3	Meningkatnya penyelesaian konflik sosial	Prosentase Penyelesaian Konflik sosial	%(4 Kegiatan)	83	94,55	113,9 %
					99,72	120,14
4	Meningkatnya penyelesaian pelanggaran norma agama, sosial dan adat	Penyelesaian pelanggaran norma agama, sosial dan adat	% (5 Kegiatan)	82	99,93	121,86
					97,74	119,19

## POHON KINERJA

Nama OPD: **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN CIREBON**

**VISI : Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju dan Aman**

**MISI : Memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional**

<b>Sasaran RPJMD yang diampu</b>	Meningkatnya penyelesaian pergesekan ( friksi ) antar dan internal umat beragama	Meningkatnya penyelesaian konflik sosial	Meningkatnya penyelesaian pelanggaran norma agama, sosial dan adat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
----------------------------------	--	--	--	--

<b>Indikator Sasaran OPD</b>	Prosentase Penyelesaian Friksi/Gesekan antar Umat Beragama	Prosentase Penyelesaian Konflik sosial	Penyelesaian pelanggaran norma agama, sosial dan adat	-Indeks kepuasan masyarakat
------------------------------	--	--	---	-----------------------------

<b>Program Prioritas OPD</b>	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
------------------------------	--	---	--	--	--	---